

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis migran Eropa atau biasa juga dikenal dengan krisis pengungsi Eropa merupakan peristiwa yang diakibatkan karena tingginya jumlah pengungsi yang datang ke Eropa melalui Laut Mediterania serta Balkan dari Timur Tengah, Asia Selatan, serta Afrika. Pada tahun 2015, krisis pengungsi Eropa dimulai ketika Eropa mengalami lonjakan arus kedatangan migran yang dimana mencapai angka lebih dari 1 juta. Hal ini terjadi karena banyaknya migran yang melarikan diri dari negara asalnya dan datang untuk meminta perlindungan dimana kebanyakan dari para migran ini berasal dari negara yang sedang memiliki kondisi politik tidak stabil, dilanda konflik antar etnis, kesulitan ekonomi, hingga peperangan seperti kawasan Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan, dan negara-negara semenanjung Balkan.

Tabel 1. 1 Jumlah Migran di Jerman Tahun 2015-2022

REFERENCE DATE	PERSONS SEEKING PROTECTION	REFUSED
31 Desember 2015	1.036.235	138.495
31 Desember 2016	1.597.570	155.120
31 Desember 2017	1.680.700	177.700
31 Desember 2018	1.781.750	192.430
31 Desember 2019	1.839.115	212.575
31 Desember 2020	1.856.785	243.140
31 Desember 2021	1.936.350	246.030
31 Desember 2022	1.936.350	254.710

Sumber : (*Statistisches Bundesamt, 2024*)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah migran yang masuk ke Jerman dari tahun 2015 hingga 2022 selalu terdapat kenaikan. Pada tahun 2022, Jerman mencapai puncak angka migrasi dimana jumlah pengungsi migran yang

masuk ke Jerman mencapai angka 3.078.650. Hal tersebut disebabkan karena lebih dari 1 (satu) juta warga Ukraina yang tiba di Jerman sejak adanya konflik antara Ukraina dan Rusia pada tahun 2022 dimana mereka tidak diharuskan mengajukan permohonan suaka (Steinhauer, Decieux, Siegert, Ette, & Zinn, 2023). Sedangkan pada periode Januari dan September tahun 2023, permohonan suaka meningkat sekitar 73% menjadi lebih dari 250.000 dibandingkan dengan periode tahun lalu. Tapi dapat kita lihat juga bahwa jumlah penolakan suaka dari tahun 2015 hingga 2022 juga selalu mengalami kenaikan.

Hal ini selaras dengan penerapan kebijakan imigrasi baru Scholz dimana ia mendukung adanya deportasi “skala besar” bagi pemohon suaka yang ditolak. Pemerintahan Scholz telah menyetujui langkah untuk mempermudah proses deportasi migran (Sarah Marsh, Andreas Rinke, 2023). Hal ini berbanding terbalik dengan kebijakan pintu terbuka Berlin di bawah pemerintahan mantan kanselir Jerman Angela Merkel pada tahun 2015.



Gambar 1. 1 Rute Migran ke Jerman Tahun 2015

Sumber: (Europol, 2015)

Pada tahun 2015, sebagian besar migran ini menggunakan jalur Balkan setelah melewati Turki, sedangkan sebagian lainnya tiba di Yunani melalui Lebanon dan sebagian lainnya lagi melalui negara-negara Afrika utara terutama Mesir dan Libya. Migran yang masuk ke wilayah Eropa ialah termasuk migran internasional, yang dimana individu yang berasal dari negara satu pindah ke suatu negara lain dan bertujuan untuk menetap dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau bahkan lebih (Geddes & Boswell, 2010). Dikarenakan seluruh anggota UE ikut menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Status Pengungsi, maka hal ini menjadikan negara anggota UE wajib menjamin hak dari para pengungsi tak terkecuali Jerman.

Pada masa kanselir Jerman Angela Merkel menjabat tahun 2015, pemerintah Jerman sempat menerapkan kebijakan *Open Door Policy* dimana

kebijakan ini dilakukan karena adanya krisis pengungsi Eropa yang terjadi. Kebijakan ini membuat Jerman menjadi salah satu negara yang membuka pintu gerbang masuk ke negaranya dan menjadi salah satu negara penerima pengungsi terbesar di Eropa. Disaat negara anggota UE yang lainnya berupaya untuk menutup pintu masuk ke negaranya dari kedatangan para pengungsi, Jerman justru membuka pintu gerbangnya lebar-lebar dan menerapkan kebijakan *Open Door Policy* dimana kebijakan ini justru mempermudah para pengungsi untuk masuk. Ketika Jerman memutuskan untuk menerima para pengungsi ini, banyak dari aktivis hingga relawan masyarakat sipil yang menyambut kedatangan para pengungsi yang dikenal dengan istilah *willkommenskultur*. Hal ini sepadan dengan slogan Angela Merkel '*Wir schaffen das*' atau '*we can do this*' yang kerap diserukannya saat berbicara didepan publik. Untuk alur kedatangan migran di Jerman, saat sampai para migran akan mendaftarkan di salah satu negara bagian Jerman dimana nantinya disana mereka akan diberikan akomodasi sementara serta diberikan sejumlah uang sekitar €140 (140 euro) perbulan sementara aplikasi suaka mereka diproses yang memakan waktu rata-rata 7 bulan. Dan jika lolos, migran tersebut akan dicarikan tempat tinggal permanen oleh negara bagian.

Pada awalnya melalui kebijakan *Open Door Policy* ini pemanfaatan para imigran ternyata cukup efektif dalam mengatasi permasalahan demografi di Jerman. Para migran yang datang tersebut dijadikan sebagai tenaga kerja produktif. Dimana Jerman merupakan salah satu negara yang memiliki masalah demografi dikarenakan *ageing populations* dimana akhirnya terjadi ketidakseimbangan jumlah pekerja usia produktif (Prakash, 2024). Namun ternyata hal tersebut tak

berlangsung lama, pemerintah Jerman mulai menerima adanya protes yang masuk dari berbagai kalangan yang disebabkan karena ternyata terlalu banyak jumlah imigran yang datang dan masuk ke Jerman serta banyaknya tindakan kejahatan yang dilakukan oleh para migran. Dalam kurun waktu satu minggu, terdapat penembakan massal yang terjadi di Munich, penyerangan berdarah yang dilakukan di kereta di selatan kota Wurzburg, bom bunuh diri di Ansbach, serta *machete attack* (Dockery, 2017). Kejadian yang terjadi tersebut akhirnya membuat kebijakan *Open Door Policy* dipertanyakan hingga mulai mendapat banyak pertentangan. Selain itu pemerintahan kota Jerman juga mengeluh mengenai tidak adanya lagi kapasitas yang cukup untuk menampung dan menyediakan tempat tinggal bagi para migran.

Karena sebab itu beberapa negara anggota UE termasuk Jerman mulai mencoba untuk membuat serta menerapkan peraturan, kebijakan, prosedur suaka, serta undang-undang yang lebih ketat untuk mengatasi kedatangan para migran serta pencari suaka. Pada tahun 2021 Olaf Scholz resmi menggantikan Angela Merkel menjadi kanselir Jerman dimana Scholz sendiri berasal dari Partai *Social Democratic Party of Germany* (SPD). Sebagai salah satu anggota partai demokrat Jerman, Scholz akan memimpin koalisi tiga partai yaitu Partai Sosial Demokrat (*Social Democratic Party/SPD*), Partai Hijau (*The Greens*), serta Partai Demokrat Bebas (*Free Democratic Party/FPD*) (Pakpahan, 2021). Sebelum naik menjadi kanselir Jerman, Scholz merupakan wakil Merkel pada tahun 2018. Namun keduanya berada di partai yang berbeda dimana Merkel berada di partai *Christian Democratic Union of Germany* (CDU) sedangkan Scholz berada di partai *Social*

Democratic Party of Germany (SPD). Selain menjadi wakil kanselir Merkel, Scholz juga sempat menjadi menteri keuangan di bawah kepemimpinan Merkel.

Pemerintah Jerman sendiri saat Angela Merkel selesai menjabat pada tahun 2021 yang kemudian digantikan oleh Olaf Scholz terdapat perubahan kebijakan baru untuk memperketat undang-undang migrasi dengan tujuan agar dapat mengurangi lonjakan migrasi. Upaya yang coba dilakukan oleh Scholz diantaranya yaitu mencoba menghentikan migrasi ilegal, meningkatkan deportasi, dan meredam arus pengungsi. Permasalahan migrasi ini menjadi tantangan politik yang cukup besar bagi para pemimpin Jerman dikarenakan adanya tekanan dari pihak oposisi maupun dari kalangannya sendiri untuk membatasi jumlah migran yang masuk, terutama migran yang berasal dari Afghanistan, Turki, serta Suriah (Pieper, 2024).

Untuk mengetahui lebih lanjut, maka penulis melakukan tinjauan pustaka terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu mengenai kebijakan luar negeri migrasi Jerman dijelaskan dalam tulisan Tasya Prima Avissa yang berjudul “*Kebijakan Jerman terhadap Krisis Pengungsi Eropa Tahun 2015-2016*” yang membahas mengenai kebijakan luar negeri migrasi yang diterapkan Jerman dalam mengatasi permasalahan migran di Eropa. Tulisan tersebut membantu penulis untuk memahami kebijakan yang diterapkan Jerman dalam menangani krisis migran di Jerman (Avissa, 2017). Terdapat pula tulisan Nadia Khansa Salsabila yang berjudul “*Aspek Pragmatisme Dalam Kebijakan Pintu Terbuka Jerman terhadap Pengungsi Timur Tengah: Solusi Grey Population*” yang memberikan penjelasan mengenai alasan Jerman mengambil serta mempertahankan kebijakan *Open Door Policy* (Salsabila, 2019). Tulisan tersebut memberikan informasi kepada penulis mengenai

kebijakan migrasi Jerman pintu terbuka milik Angela Merkel. Tulisan lain yang membahas mengenai kebijakan pintu terbuka milik Angela Merkel adalah tulisan oleh Annisa Nabilatul Kahira, Muhammad Yusra, Rifki Dermawan yang berjudul “*Angela Merkel’s Perception and Open Door Policy during the 2015 European Refugee Crisis*”. Tulisan ini menjelaskan mengenai citra serta kepercayaan yang mempengaruhi persepsi yang dimiliki oleh Merkel dalam membela dan menegakkan kebijakan kontroversialnya (Khaira, Yusra, & Dermawan, 2022). Tulisan yang membahas mengenai dinamika politik domestik Jerman dalam mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Jerman melalui retorika anti-imigran adalah tulisan milik Theadora Serena Petropoulos berjudul “*Breaking Point: How Migrant Crises Have Influenced the Rise of Far-Right Parties in Italy, Germany, and the UK*” (Petropoulos, 2021).

Maka dari tinjauan pustaka terdahulu tersebut, ditemukan jeda penelitian yaitu penelitian ini menggunakan negara Jerman sebagai subjek penelitian dengan jangka waktu penelitian pada tahun 2021 hingga 2023 dengan memusatkan pada perubahan kebijakan luar negeri migrasi Jerman dengan rumusan masalah yang belum pernah dibahas yakni faktor apa saja yang memengaruhi perubahan kebijakan luar negeri migrasi Jerman dari kanselir Jerman Angela Merkel ke Olaf Scholz.

1. 2 Rumusan Masalah

Bagaimana perubahan kebijakan migrasi Jerman terjadi di era pemerintahan Olaf Scholz tahun 2021 – 2023?

1. 3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada khalayak umum dalam bentuk penelitian ilmiah dan diharapkan nantinya dapat digunakan menjadi referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar S1 dalam program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang sudah dijelaskan, tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi perubahan kebijakan luar negeri migrasi Jerman pada masa jabatan Angela Merkel ke Olaf Scholz.

1. 4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Teori Perubahan Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy Change*)

Kebijakan luar negeri merupakan sikap ataupun tindakan dari suatu negara yang merupakan output luar negeri yang berlandaskan pemikiran dan pola tindakan yang disusun oleh pembuat keputusan dengan tujuan untuk menanggulangi permasalahan serta mengusahakan perubahan dalam lingkungan internasional (Holsti, 1992). Tujuan kebijakan luar negeri dibagi berdasarkan tujuan jangka

panjang, jangka menengah, serta jangka pendek. Dimana tujuan jangka panjang kebijakan luar negeri pada dasarnya ialah untuk mencapai perdamaian, keamanan, serta kekuasaan (Rosenau, 1969).

Pada saat suatu negara mengubah kebijakan luar negerinya, hal itu dapat mempengaruhi negara tersebut serta sistem politik dunia internasional. Hal ini tentu saja dapat mengganggu atau bahkan dapat menyebabkan terjadinya peperangan. Maka dari itu sangat penting untuk memahami penyebab dasar perubahan kebijakan luar negeri. Sebelumnya sudah terdapat beberapa model teoritis mengenai studi ini yang sudah dibuat oleh para sarjana. Namun, model-model teoritis tersebut mengabaikan faktor-faktor tertentu dimana faktor-faktor tersebut belum cukup untuk menjelaskan sepenuhnya perubahan kebijakan luar negeri. Maka dari itu model yang ditampilkan oleh Eidenfalk ini mencoba untuk memasukkan semua faktor yang mempengaruhi keputusan suatu pemerintahan untuk mengubah kebijakan luar negerinya dan memasukkannya kedalam model teoritis yang digunakan untuk menjelaskan serta memperkenalkan faktor-faktor yang belum dijelaskan dalam model-model teoritis sebelumnya.

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi suatu pemerintahan atau aktor kunci pembuat keputusan melakukan perubahan kebijakan luar negerinya menurut teori Eidenfalk, diantaranya yaitu faktor domestik dan faktor internasional (Eidenfalk, 2006). Yang pertama yaitu faktor domestik dimana faktor domestik ini terdiri dari birokrasi, opini publik, media, kelompok kepentingan, serta partai-partai politik. Lalu faktor internasional yang terdiri dari faktor global, regional, hubungan bilateral, serta aktor *non-state* (Eidenfalk, 2006).

Seperti yang dijelaskan Eidenfalk, terdapat lima faktor domestik yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri yang meliputi birokrasi, opini publik, media, kelompok kepentingan, serta partai politik. Faktor domestik memainkan peran penting dalam mempengaruhi serta menekan pemerintah ke dalam kemungkinan perubahan kebijakan luar negeri. Pada faktor birokrasi, Eidenfalk mengutip dari tulisan milik Morton H. Halperin dimana Halperin menjelaskan bahwa sistem birokrasi pada dasarnya bersifat statis, hanya bergerak jika terdapat dorongan keras secara terus menerus, dimana mayoritas birokrat lebih suka mempertahankan status quo, waktu serta sumber daya setiap orang dalam birokrasi terbatas, dan ketika seorang partisipan menginginkan sebuah perubahan, ia harus memilih dengan hati-hati isu yang akan diperjuangkan (Halperin, 1974). Walaupun begitu Hermann dalam model teorinya mengatakan bahwa, sebuah kelompok di dalam pemerintahan dapat menjadi efektif dalam mengadvokasi perubahan kebijakan birokrasi apabila mempunyai akses ke pejabat tinggi (Hermann, 1990). Hal ini membuktikan bahwa birokrasi dapat memainkan peran yang cukup penting dalam perubahan kebijakan luar negeri.

Faktor opini publik menjadi sumber perubahan yang cukup penting dikarenakan pejabat pemerintah membutuhkan dukungan dari cukup banyak pemilih untuk melaksanakan kebijakannya dan memastikan dirinya akan terpilih kembali untuk dapat tetap berkuasa. Dan apabila masyarakat merasa tidak puas dengan suatu kebijakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah lalu diekspresikan melalui demonstrasi, hal ini dapat dijadikan sebagai tekanan untuk para pengambil keputusan yang nantinya dapat mengarah pada perubahan kebijakan luar negeri

(Eidenfalk, 2006). Selain itu opini publik juga memiliki peran penting dalam membantu memberikan dukungan bagi kelompok-kelompok kepentingan serta aktor masyarakat lain dalam upaya mempengaruhi keputusan pemerintah (Eidenfalk, 2006).

Faktor media dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap isu-isu kebijakan dengan cara mendukung atau mengutuk kebijakan tertentu sehingga hal ini dapat mempengaruhi opini publik serta memberikan tekanan pada pemerintah (Eidenfalk, 2006). Media menjadi penghubung antara publik dengan pemerintahan. Para pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan faktor media jika mereka ingin berhasil mengumpulkan dan membangun dukungan untuk kebijakan mereka (Malek & Wiegand, 1997). Media dapat menjadi faktor penting dalam menentukan agenda serta dalam membentuk opini publik, media memberikan informasi dari pemerintah kepada publik (Kingdon, 1984).

Pada faktor kelompok kepentingan, akses dan aktivitas merupakan hal yang penting untuk mempengaruhi kebijakan meskipun akses dan aktivitas itu sendiri tidak menjadi jaminan bagi keberhasilan dalam mempengaruhi. Selain itu, daya ungkit serta pengaruh kelompok kepentingan juga kian meningkat seiring dengan meningkatnya globalisasi (Dietrich, 1992). Lalu faktor yang terakhir partai politik dimana tekanan dari pemilih atau opini publik dapat memunculkan tekanan pada anggota parlemen yang akhirnya dapat membuat mereka menekan pemerintah atas isu kebijakan tertentu (Gustavsson, 1998).

Dalam menjelaskan faktor internasional yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri, Eidenfalk membaginya menjadi 4 (empat) bagian yaitu faktor global, faktor regional, hubungan bilateral, serta aktor *non-state*. Faktor global merupakan faktor yang fokus terhadap perubahan sistem politik secara global yang dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan negara lainnya. Sedangkan pada faktor regional, aktor-aktor regional yang terdiri dari institusi negaranya memiliki dampak cukup besar terhadap perubahan kebijakan luar negeri dimana faktor regional ini berfokus pada formasi kebijakan luar negeri yang ada pada tingkat wilayah kawasan. Selain itu norma-norma yang ada pada wilayah regional juga harus dipertimbangkan ketika suatu pemerintah akan menentukan kebijakan luar negerinya. Dikarenakan tiap wilayah regional memiliki norma-norma yang berbeda yang berakar dari nilai-nilai budaya, sejarah, serta tradisi tertentu (Eidenfalk, 2006).

Pada faktor hubungan bilateral, faktor ini mempertimbangkan hubungan bilateral pemerintah dengan aktor lain negara maupun institusi global atau regional. Faktor yang terakhir yaitu aktor *non-states*, meskipun negara dikenal sebagai aktor utama dalam sistem politik internasional, tetapi dalam studi perubahan kebijakan luar negeri aktor *non-states* tidak bisa diabaikan. Aktor *non-states* dapat memberikan kekuasaan ataupun pengaruh yang signifikan dalam isu-isu tertentu dimana mereka dapat membentuk hingga memberikan pengaruh kepada kebijakan luar negeri suatu negara. Maka dari itu, pengambil keputusan harus mempertimbangkan pengaruh dari aktor *non-state* ketika memutuskan kebijakan luar negeri (Eidenfalk, 2006).

1.4.2 Konsep Migrasi Internasional

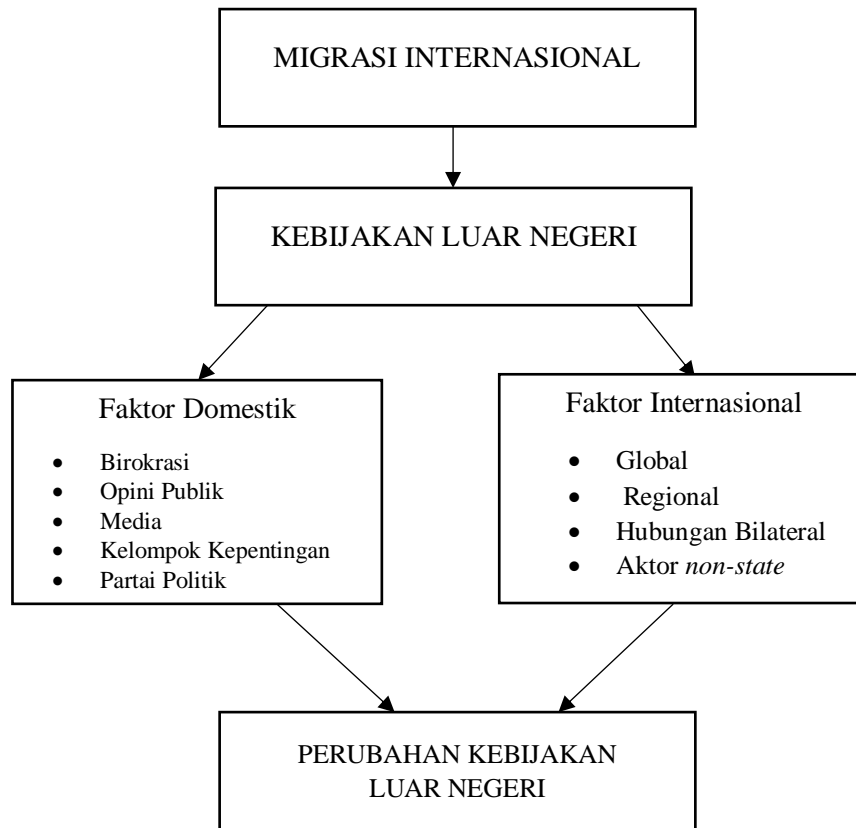
Migrasi dapat dikatakan sebagai suatu fenomena perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah yang lain yang melewati batas administratif suatu negara ataupun daerah baik itu sifatnya permanen maupun sementara. Terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi terjadinya migrasi, diantaranya seperti terjadinya perang, perubahan ekonomi, serta perubahan iklim (Ottaviano & Peri, 2012). Dari pengertian tersebut migrasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu migrasi internal serta migrasi internasional. Migrasi internasional merupakan bentuk mobilitas penduduk yang melampaui batas wilayah negara dan budaya (Kritz, Lim, & Zlotnik, 1992). Dimana migrasi internasional ini mengacu kepada perpindahan penduduk dengan melewati batas suatu negara baik dilakukan oleh individu ataupun kelompok. Sedangkan Lee memberikan definisi lebih luas mengenai migrasi internasional dimana ia mengemukakan bahwa migrasi internasional merupakan suatu aktivitas perpindahan penduduk yang mencakup aspek tujuan migrasi, perubahan tempat tinggal, tujuan migrasi, dan keinginan untuk menetap atau tidak di daerah yang dituju (Lee, 1966).

Saat ini migrasi internasional menjadi fenomena global dimana hal ini terjadi sangat kompleks dan dampaknya yang sangat terasa. Migrasi internasional merupakan bagian integral dari globalisasi yang dapat ditandai dengan perluasan, pendalaman, serta percepatan keterhubungan dalam seluruh aspek kehidupan sosial modern dunia (Castles, 2000). Jika dianalisis dari perspektif pembangunan suatu negara, migrasi internasional mempunyai kelebihan maupun kekurangannya. Dikatakan bahwa migrasi mempunyai kelebihan yang positif terhadap

pembangunan suatu negara dikarenakan memfasilitasi pembangunan untuk negara penerima dimana negara tersebut dapat memperoleh keahlian serta tenaga kerja terampil dan tidak terampil yang dibutuhkan. Namun di satu sisi, negara penerima juga dapat menderita dikarenakan adanya perpindahan migran yang tidak diinginkan masuk ke negara tersebut sebagai pengungsi. Ada beberapa negara yang menganggap migrasi yang berkaitan dengan perbedaan budaya merupakan ancaman terhadap kedaulatan serta identitas nasional. Migrasi mengikis batas-batas antar bahasa, budaya, kelompok etnis, serta negara-bangsa. Oleh karena itu, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi tradisi budaya, identitas nasional serta politik institusi (Castles, 2000).

Migrasi internasional terjadi dalam sebuah dunia yang terbagi atas beberapa negara dimana bertempat tinggal di negara kelahiran masih menjadi norma, sedangkan berpindah ke negara lain merupakan sebuah penyimpangan (Castles, 2000). Maka dari itu migrasi kerap dianggap sebagai suatu permasalahan yang harus dikendalikan serta harus dibatasi agar tidak menimbulkan perubahan-perubahan yang tidak diprediksi (Dewi, 2013). Menurut Castles, salah satu cara negara dalam berupaya meningkatkan kontrol adalah dengan membagi migran internasional ke dalam beberapa kategori diantaranya yaitu tenaga kerja migran sementara, migran berketerampilan tinggi atau pelaku bisnis, migran ilegal, pengungsi, pencari suaka, migrasi paksa, anggota keluarga, serta para migran yang kembali (Castles, 2000).

1. 5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1. 1 Sintesa Pemikiran

Berdasarkan sintesa pemikiran di atas, perubahan kebijakan luar negeri Jerman yang mengacu pada teori perubahan kebijakan luar negeri milik Eidenfalk dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor domestik dan faktor internasional. Dimana faktor domestik tersebut mencakup birokrasi, opini publik, media massa, kelompok kepentingan, serta partai politik. Sedangkan faktor internasional mencakup global, regional, hubungan bilateral, serta aktor *non-state*.

1. 6 Argumen Utama

Perubahan kebijakan luar negeri Jerman mengenai kebijakan migrasi internasional pada saat masa jabatan Olaf Scholz disebabkan karena beberapa

faktor, yaitu: (1) faktor domestik, dan (2) faktor internasional. Tetapi dalam kasus perubahan kebijakan luar negeri Jerman sebagian besar disebabkan karena faktor domestik. Faktor domestik tersebut meliputi peran dari birokrasi *Ministry of the Interior* Jerman, opini publik, media, kelompok kepentingan PEGIDA serta partai politik seperti *Social Democratic Party of Germany* (SPD), dan partai populis sayap kanan *Alternative for Germany* (AFD) yang turut mempengaruhi perubahan kebijakan. Lalu terdapat pula faktor internasional yang ikut mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Jerman yaitu faktor global, regional, hubungan bilateral yakni adanya kesepakatan antara Uni Eropa (UE) dengan Turki terkait pengembalian ribuan migran yang suakanya ditolak. Lalu faktor yang terakhir yaitu aktor *non-state* dimana terdapat ancaman keamanan dari kelompok terorisme.

1. 7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian eksplanatif. Tujuan penulis menggunakan tipe penelitian eksplanatif ini untuk menjelaskan sebab di balik sebuah fenomena untuk mengetahui alasan-alasan mengapa fenomena tersebut dapat terjadi. Penelitian dengan menggunakan tipe penelitian eksplanatif merupakan salah satu metode penelitian yang menjelaskan sebab terjadinya suatu fenomena dengan menganalisis hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya yang diteliti (Bungin, 2017). Dilakukannya penelitian eksplanatif ini adalah untuk menjelaskan mengapa suatu gejala atau suatu fenomena dapat terjadi (Priyono, 2016). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode

eksplanatif dimana nantinya penulis akan memberikan analisis terhadap mengapa terdapat perubahan kebijakan luar negeri migrasi Jerman di masa Olaf Scholz tahun 2021-2023 dengan cara menganalisis faktor-faktor yang menjadi sebab dari adanya perubahan kebijakan tersebut dengan menggunakan teori *Foreign Policy Change* oleh Eidenfalk.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini memiliki jangkauan dimana jangkauan penelitian ini meneliti dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan batasan fokus dalam pembahasan pada penelitian ini. Penulis menggunakan jangkauan penelitian dari tahun 2021-2023 dikarenakan pada tahun 2021 terdapat pergantian jabatan kanselir Jerman dari Angela Merkel menjadi Olaf Scholz. Pada masa jabatannya, Scholz menerapkan kebijakan baru mengenai migrasi untuk memperketat pintu masuk agar tidak semakin banyak imigran yang masuk ke Jerman setelah sebelumnya dilakukan kebijakan *Open Door Policy* oleh mantan kanselir Jerman Angela Merkel.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan faktor yang sangat penting guna keberhasilan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang sehubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat lalu mengolah bahan penelitian (Zed, 2004). Tujuan dari dilakukannya teknik pengumpulan data studi kepustakaan ialah untuk mengetahui

pembahasan lebih mendalam mengenai suatu tema atau topik untuk mendapatkan landasan teori mengenai topik permasalahan yang akan diteliti (Sarwono, 2006). Penulis mengumpulkan serta melakukan identifikasi dari data-data yang sudah ada baik itu dari jurnal, buku, makalah atau artikel, maupun internet yang berhubungan dengan topik yang diteliti oleh penulis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik studi kepustakaan yang didapatkan dari jurnal serta artikel terkait topik yang diteliti oleh penulis yang nantinya akan dijadikan sebagai sumber rujukan untuk penelitian yang sedang dilakukan.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data atau metode analisis kualitatif. Teknik analisis data kualitatif merupakan jenis metode yang menghasilkan penemuan dimana penemuan tersebut tidak bisa didapatkan dengan langkah statistik maupun cara lain dari kuantifikasi ataupun pengukuran dimana jenis penelitian kualitatif ini bisa digunakan untuk meneliti mengenai sejarah, kehidupan sosial, perilaku, dan lain-lain (Strauss & Corbin, 1998). Tujuan dari teknik analisis data kualitatif ini adalah untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh menggunakan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata maupun bahasa (Moleong, 2007). Disini tujuan penulis menggunakan metode analisis kualitatif adalah data yang diperoleh akan dianalisis untuk menentukan dan mendapatkan kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Dalam metode analisis kualitatif, data yang diperoleh dalam jumlah besar dan mempunyai banyak variasi akan dikelompokkan untuk diproses lebih lanjut agar dapat ditarik suatu kesimpulan. Setelah dianalisis, nantinya data tersebut akan

digunakan untuk menjawab rumusan masalah serta digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan hasil penelitian agar dapat lebih mudah dipahami oleh orang lain.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan menjadi 4 (empat) bagian, diantaranya sebagai berikut:

BAB I merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, serta metode penelitian.

BAB II menjelaskan mengenai faktor domestik yang memengaruhi perubahan kebijakan luar negeri migrasi Jerman yang dimana mencakup faktor birokrasi, opini publik, media massa, kelompok kepentingan, dan partai politik. Serta faktor internasional yang mencakup faktor global, regional, hubungan bilateral, dan aktor *non-state*.

BAB III berisi analisa keterkaitan antara faktor domestik dengan faktor internasional pada perubahan kebijakan migrasi di era pemerintahan Olaf Scholz.

BAB IV merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya.